

**LAPORAN SINGKAT**  
**HASIL SIDANG THE 30TH MEETING OF THE PUIC EXECUTIVE COMMITTEE**  
**BAKU, AZERBAIJAN, 19-20 JUNI 2013**

---

Pembukaan:

Pada tanggal 19-20 Juni 2013 telah dilaksanakan Pertemuan *Executive Committee* PUIC ke-30 di Baku, Azerbaijan. DPR RI sebagai salah satu anggota Excom PUIC telah mengirimkan delegasinya yang terdiri dari:

- a. Bapak Dr. K.H. Surahman Hidayat, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI
- b. Bapak Drs. H. Saiful Islam, M.Si., Kepala Biro KSAP DPR-RI
- c. Bapak Mochamad Ilyas, Tenaga Ahli BKSAP DPR-RI
- d. Bapak Widjoseno Sastroamidjojo, Kasubdit Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini, KEMLU RI.

Dalam pertemuan tersebut membahas rancangan rangkaian pertemuan PUIC mendatang di Burkina Faso, yaitu Konferensi PUIC ke-9 tahun 2014 di Burkina Faso; Pertemuan General Committee ke-16; Pertemuan *Executive Committee* PUIC ke-31; Konferensi *Muslim Women Parliamentarians*, dan Pertemuan *Standing Committee on Palestine*. Selain itu, telah diadopsi juga agenda pembahasan untuk 4 (empat) *Standing Specialized Committees* PUIC (*Committee on Political Affairs and Foreign Relations; Committee on Economic Affairs and Environment; Committee on Human Rights, Women, and Family Affairs; Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions*).

Hasil-hasil Pertemuan:

1. Sesi pembukaan dipandu oleh Sekretaris Jenderal PUIC, Professor Dr. Mahmud Erol Kilic (Turki). Pada sesi pembukaan ini, *First Deputy Chairman of the Milli Mejlis of Azerbaijan Republic*, Ziyafet Abbas Asgarov, dalam kata sambutannya menekankan bahwa nilai-nilai Islam yang mengedepankan rasa persahabatan, solidaritas dan persaudaraan merupakan unsur perekat utama di dalam hubungan antarnegara-negara anggota PUIC. Sehubungan dengan itu pertemuan *Excom* PUIC ini diharapkan tidak hanya akan dapat meningkatkan hubungan antarnegara-negara anggotanya, tetapi juga dapat membantu dalam mengimplementasikan tujuan PUIC itu sendiri. Lebih jauh Ziyafet Asgarov juga menyinggung perkembangan situasi keamanan dunia saat ini dengan menyinggung konflik Nagorno-Karabakh yang dinilai Azerbaijan sebagai ancaman serius terhadap keamanan internasional. Konflik tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif melalui mekanisme hukum internasional.
2. Pertemuan Komite Eksekutif PUIC ke-30 dipimpin oleh Ghover Vasheliyeva, anggota Komite Eksekutif PUIC dari Azerbaijan. Pertemuan kemudian juga memilih Wakil Ketua yaitu Uni Emirat Arab mewakili negara-negara kelompok Arab sebagai Wakil Ketua I dan Burkina Faso mewakili negara-negara kelompok Afrika sebagai Wakil Ketua II.
3. Sesuai mata agenda 2, Sekjen PUIC menyampaikan laporannya secara ringkas dengan menekankan tentang arti penting informasi bagi kepentingan negara-negara anggota PUIC. Oleh karena itu, setiap negara-negara anggota PUIC diminta lebih aktif di dalam menyampaikan berbagai informasi pada setiap kesempatan di fora internasional, khususnya terkait dengan isu-isu yang menjadi kepentingan dan kekhawatiran PUIC seperti: masalah Islamophobia, perkembangan ekonomi dan sebagainya. Dalam hal ini Sekjen PUIC mendorong agar negara-negara anggota PUIC juga aktif dalam menyelenggarakan pertemuan pembahasan berbagai isu tersebut. Selain itu, Sekjen PUIC juga menyinggung mengenai status kontribusi tahunan negara-negara anggota PUIC. Dilaporkan bahwa

sebanyak 60% telah diterima tahun ini dari negara-negara anggota PUIC dan Sekretariat PUIC masih menunggu kontribusi dari negara-negara PUIC yang belum melakukan pembayaran. Di lain pihak, beberapa negara anggota PUIC seperti Maroko, Indonesia, dan Niger meminta Sekjen PUIC untuk menerapkan semua resolusi yang disepakati dalam pertemuan di Khartoum, di antaranya kunjungan ke Jalur Gaza dan Mali. Bahkan Maroko menegaskan bahwa *Executive Committee* mempunyai tugas untuk menerapkan *Rules and Procedures* dan harus terlibat dalam implementasi resolusi.

4. Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan kali ini adalah:

- a. **Kunjungan ke Jalur Gaza dan Mali.** Anggota Parlemen Maroko menekankan bahwa sejalan dengan hasil kesepakatan di Khartoum, maka PUIC harus segera mengatur kunjungan ke Jalur Gaza guna memberikan sinyal kepada dunia luar tentang dukungan dan perhatian PUIC terhadap nasib bangsa Palestina. Sekjen PUIC menanggapi bahwa persiapan untuk kunjungan ke Jalur Gaza terus diupayakan, namun tingkat partisipasi anggota PUIC masih dinilai kurang. Dalam kaitan ini, menurut anggota Parlemen Sudan, apabila tidak banyak partisipasi dari anggota PUIC, maka beberapa negara anggota dapat berangkat atas nama PUIC. **Dr. Surahman Hidayat**, Delegasi RI, juga mendukung kunjungan tersebut dan menganjurkan agar kunjungan tersebut bisa dilaksanakan meskipun hanya bersifat simbolis.
- b. **Partisipasi Sekjen PUIC di fora Internasional.** Indonesia menghargai partisipasi aktif Sekjen PUIC dalam berbagai fora internasional. Namun Indonesia meminta agar Sekjen PUIC juga melampirkan seluruh hasil kegiatan yang telah dihadiri ke dalam laporannya agar dapat diketahui oleh negara-negara anggota PUIC.
- c. **Website PUIC.** Indonesia menyampaikan dukungannya kepada pihak Sekretariat PUIC dalam perbaikan tampilan Website PUIC. Namun jangka waktu perbaikan tersebut dinilai terlalu lama (melebihi 6 bulan) sehingga menyulitkan negara-negara anggota PUIC dalam mendapatkan informasi terkini mengenai PUIC. Sekjen PUIC berjanji akan terus memperbaiki tampilan Website PUIC dan menjelaskan bahwa lamanya waktu perbaikan tersebut dikarenakan banyak dokumen yang harus di-*upload*.
- d. **Draft Rangkaian Agenda Konferensi PUIC ke-9 di Burkina Faso.** Pertemuan *30<sup>th</sup> PUIC Executive Committee* ini telah menetapkan tanggal pelaksanaan rangkaian Konferensi PUIC ke-9 mendatang di Burkina Faso yaitu pada tanggal 23-28 Januari 2014. Anggota Parlemen Burkina Faso menyampaikan bahwa negaranya menjamin kesuksesan pelaksanaan Konferensi PUIC ke 9 mendatang. Dalam kaitan dengan persiapan Konferensi tersebut, Sekjen PUIC meminta setiap negara anggota PUIC dapat menyampaikan ide atau proposal masing-masing parlemen terhadap isi draft agenda untuk ke 4 *Standing Specialized Committees (Committee on Political Affairs and Foreign Relations ; Committee on Economic Affairs and Environment ; Committee on Human Rights, Women and Family Affairs dan Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions)* yang disirkulasikan.
- e. Adapun beberapa masukan dari negara-negara anggota *Executive Committee PUIC* untuk ke 4 *Standing Specialized Committees* tersebut adalah sebagai berikut:
  - i. Delegasi Saudi Arabia mempertanyakan apakah isu mengenai situasi di Syria akan dibahas secara menyeluruh atau secara selektif saja, misalnya seperti akar permasalahannya atautkah permasalahan turunannya (pengungsi, dan sebagainya).
  - ii. Delegasi Burkina Faso berharap agar Nigeria sebagai negara besar di Afrika dapat memainkan peranan dalam penyelesaian masalah di Mali. Menanggapi hal ini Sekjen PUIC menyatakan bahwa Nigeria belum menjadi negara anggota PUIC walaupun telah berkali-kali diundang untuk masuk.
  - iii. Delegasi Niger juga menyampaikan bahwa PUIC harus mengirimkan *fact finding mission* ke Mali.
  - iv. Delegasi Sudan dan Chad mengusulkan agar *agenda item* nomor 19, 20 dan 21 dari *draft agenda of the 2<sup>nd</sup> meeting of Committee on Political Affairs and Foreign Relations* (terkait Jammu dan Kashmir; Muslim Rohingya dan Muslim di Filipina Selatan) dihapus karena sudah tercakup dalam *agenda item* nomor 4 (*Solidarity*

*with Muslim Minorities around the World*). Namun Sekjen PUIC menanggapi bahwa karakteristik masing-masing minoritas Muslim tersebut berbeda-beda, sehingga perlu adanya pemisahan.

- v. Uni Emirat Arab meminta agar *Draft Islamic Parliament* dimasukkan sebagai salah satu *draft agenda item* dalam *Committee on Political Affairs and Foreign Relations*
  - vi. Delegasi Azerbaijan meminta penyebutan kata *Nagorno* dalam isu Nagorno-Karabakh dirubah menjadi *Al Jabaliyah* sehingga menjadi *Karabakh-Al Jabaliyah*. Alasan atas perubahan dari kata *Nagorno* tersebut adalah karena Azerbaijan ingin melepaskan diri dari istilah yang bernuansa Rusia, yang mana “*Nagorno*” merupakan kata yang berasal dari bahasa Rusia yang berarti “pegunungan”.
  - vii. Delegasi Indonesia menyampaikan secara tertulis kepada Sekjen PUIC agar *draft agenda item* nomor 7 dari *Committee on Human Rights, Women and Family Affairs* yaitu “*Utilizing women capabilities in combating poverty and solving problems caused by conflicts and natural disasters*” mencakup juga perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di negara-negara anggota PUIC. Indonesia juga berjanji akan segera menyampaikan *draft* resolusi terkait perlindungan TKW dimaksud kepada Sekretariat PUIC.
5. Delegasi Indonesia juga menyampaikan penekanan kembali kepada Sekjen PUIC terutama tentang mata agenda 3 (*Consideration of the Report of the Committee on the Study of the Islamic Parliamentary Declaration*), mata agenda 4 (*Observation on the draft amendment of the PUIC Rules of Procedures in the light of the new Statute which has been amended in the Second Extraordinary PUIC Conference which was held in Abu Dhabi in January 2011*). Masukan tertulis yang disampaikan melalui Sekretariat PUIC adalah sebagai berikut:
- a. Terkait pembahasan *agenda item* 3 Indonesia menegaskan kembali agar judul “*Islamic Parliamentary Declaration*”, diubah menjadi “*Parliamentary Declaration of the PUIC Member States*” mengingat bahwa tidak semua negara-negara anggota PUIC merupakan negara Islam, seperti di antaranya Indonesia, Mesir dan Turki. Selain itu juga, Paragraf pertama “*We, members of the Islamic Parliaments participating in the Conference of the Parliamentary Union of the Organization of the Islamic Cooperation Member States...*” agar diubah menjadi “*We, members of the Parliaments of the OIC Member States participating in the Conference of the PUIC,...*”.
  - b. Terkait pembahasan *agenda item* 4, Indonesia berpendapat bahwa pada *Rule of Procedure* no. 1.2. perlu ditambahkan kalimat sebagai berikut (yang dicetak tebal) “...**Parliamentary Unions to which observer status has been accorded by the General Assembly of the United Nations** may attend...” guna lebih memperjelas pihak-pihak yang diperbolehkan untuk hadir sebagai observer.
  - c. Dalam pertemuan *the 3rd Meeting of the committee of Experts for Preparation of a Draft Islamic Paliamentary Declaration* sebelumnya di Khartoum (5-6 Maret 2013) ditekankan kembali akan pentingnya pembentukan *Islamic Parliamentary* sebagai institusi yang akan mendorong kerjasama antar Parlemen negara-negara anggota OKI. Namun permasalahannya adalah bahwa Sekretariat PUIC sendiri belum mengetahui apakah OKI menyetujui pembentukan *Islamic Parliament* tersebut dan siapa yang berwenang atas pembentukannya. Oleh karena itu maka Indonesia menyampaikan perlu adanya pembahasan dan kesepakatan antara PUIC dan OKI yang dituangkan ke dalam bentuk *Draft Protokol* yang isinya mengatur kewenangan masing-masing dalam pembentukan *Islamic Parliamentary* dan masalah teknis lainnya seperti: keanggotaan maupun penunjukan Ketua dan Wakil *Islamic Parliamentary*.
8. **Pengamatan dan Rekomendasi:**
- a. Penyelenggaraan *the 30<sup>th</sup> PUIC Executive Committee Meeting* berhasil menyepakati keputusan penting, di antaranya yaitu penetapan rangkaian agenda Konferensi PUIC ke 9 di Ouagadougou, Burkina Faso, khususnya *draft agenda item of the 2<sup>nd</sup> Meetings of the Standing Specialized Committees* dan tanggal penyelenggaraan Konferensi.
  - b. Pertemuan ke-30 Komite Eksekutif PUIC ini memiliki tingkat kehadiran dengan keterwakilan negara-negara anggota PUIC yang tinggi (14 dari seluruh 15 negara

PUIC *Executive Committee*) dibanding pertemuan sebelumnya. Hal ini memberikan bobot legitimasi yang tinggi atas keputusan yang diambil pada pertemuan kali ini.

- c. Indonesia perlu terus menekankan kembali posisinya mengenai pembentukan *Islamic Parliamentary* khususnya terkait dengan judul *Islamic Parliamentary Declaration*. Hal ini mengingat bahwa Konferensi PUIC ke 9 di Ouagadougou, Burkina Faso mendatang masih akan tetap membahas *Islamic Parliamentary Declaration* (sesuai dengan desakan Uni Emirat Arab).
- d. Terkait dengan *draft agenda item* nomor 7 dari *Committee on Human Rights, Women and Family Affairs*, Indonesia perlu segera menyiapkan draft resolusi yang menekankan perlindungan TKW di negara-negara anggota PUIC.

Demikian disampaikan dan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

---

**Baku, 21 Juni 2013**  
**Pembuat Laporan**

TTD

**Dr. Surahman Hidayat**  
**Ketua Delegasi**